

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI DI KECAMATAN SULANG)

Liza Diyah Ayu Rosanti

NPP 30.0690

Asdaf Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email : lizadiya.ar@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anwar Rosshad, S.H, M.Si

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a condition of failure to thrive in children under five which is caused by chronic malnutrition from birth to the first 1,000 days of life so that children grow too short for their age. One of them is to realize the GEMILANG Regency of Rembang. The government continues to improve and improve programs on stunting prevention in Rembang.

Purpose: This study aims to find out how or what are the efforts made by the government of Rembang Regency specifically at the Health Service regarding accelerating the reduction of stunting to create a stunting-free Rembang Regency in 2024, as well as what factors are the obstacles in this stunting prevention process.

Method: This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data collection techniques carried out are through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and then drawing conclusions.

Result: based on the data the author obtained during the research activities, there has been a significant reduction of stunting has a positive impact on the community, especially stunting toddlers. **Conclusion:** Based on the analysis conducted by the researchers, the process of handling stunting in Rembang Regency has been going well so far. However, it has not run optimally because the services provided to the community are still lacking and the community lacks knowledge of the importance of nutrition. The government is expected to improve services to the community and provide socialization about the importance of nutrition.

Keywords: Government, Stunting, Health Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak tumbuh terlalu pendek untuk usianya. Salah satu mewujudkan Kabupaten Rembang yang GEMILANG . Pemerintah terus membenahi serta meningkatkan program-program tentang pencegahan stunting di Kabupaten Rembang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana atau apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang khusus di Dinas Kesehatan tentang percepatan penurunan stunting untuk mewujudkan Kabupaten Rembang bebas stunting 2024, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pencegahan stunting ini. **Metode:** penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. **Hasil/ temuan:** berdasarkan data yang penulis peroleh selama kegiatan penelitian, telah terjadi penurunan angka stunting yang signifikan selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023. Adanya program percepatan penurunan stunting ini memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya balita stunting. **Kesimpulan :** Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan proses penanganan stunting di Kabupaten Rembang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Namun belum berjalan dengan maksimal disebabkan karena layanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan akan pentingnya gizi. Pemerintah diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya gizi.

Kata kunci : Pemerintah, Stunting, Dinas Kesehatan

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia kasus kekurangan gizi masih terus meningkat. Permasalahan gizi yaitu gangguan kesehatan yang terjadi akibat tidak seimbangnya antara asupan dengan kebutuhan yang dapat menghambat kualitas sumber daya manusia. Salah satu akibat kekurangan gizi yaitu stunting. Stunting yaitu suatu keadaan pada anak yang berumur kurang dari 5 tahun yang mengalami keterlambatan dalam tumbuh dan kembangnya yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi stunting akan tampak setelah bayi berusia 2 tahun dimana panjang atau tinggi badannya dibawah -2 standar deviasi (SD). Ada beberapa faktor penyebab terjadinya stunting diantaranya yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Adapun Penyebab langsung dipengaruhi pada variable asupan gizi, pengetahuan gizi ibu, kadarzi, dan riwayat penyakit infeksi. Sedangkan secara tidak langsung mempengaruhi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu melalui penyakit infeksi. Anak stunting akan mengalami hambatan pada perkembangan otaknya. Yang berpengaruh pada kemampuan *psikis* anak. Anak akan kesulitan untuk mengingat, menyelesaikan masalah, dan terhambat pada aktivitas yang melibatkan kegiatan mental atau otak.

Menurut hasil SSGI, pada 2021 di Jawa Tengah anak yang berusia di bawah 5 tahun menderita stunting sebanyak 20,9%. Ada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dimana 14 kabupaten/kota dengan *roporsi* balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 21 kabupaten/kota lainnya memiliki prevelensi di bawah angka provinsi. Kabupaten Rembang adalah kabupaten yang tergolong angka stunting cukup rendah. Jumlah balita pada saat ini yaitu 39.297 anak, sedangkan balita stunting berjumlah 5.540 anak. Kasus stunting di Kabupaten Rembang pada 2018 sebanyak 26% dari jumlah anak lahir. Selanjutnya di tahun 2019 menurun menjadi 22.9%. Namun pada tahun 2020 kasus stunting di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan menjadi 24.97%. (rikesdas, 2021). Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mana keterbatasan aparat tenaga kesehatan yang fokus terhadap penanganan covid-19 dan dalam situasi covid-19 tidak bisa mengumpulkan orang banyak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang stunting serta tentang anggaran yang fokus digunakan untuk penanganan covid-19 . dan tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Rembang mengalami penurunan menjadi 14,07% (rikesdas, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang bahwa prevelensi stunting di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi. Oleh sebab itu permasalahan stunting adalah wewenang yang harus dikerjakan bersama-sama oleh pemangku

kepentingan terkait. Salah satunya yaitu Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah di bidang kesehatan

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan program-program dalam mengatasi permasalahan di bidang kesehatan salah satunya adalah masalah stunting. Ada beberapa strategi yang dibuat untuk mengatasi stunting yaitu strategi organisasi, program yang akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan. Namun hal tersebut masih kurang maksimal diantaranya yaitu masih banyak program yang dibuat dinas kesehatan yang belum tercapai 100%, masih rendahnya kader-kader penanganan stunting yang ada di desa-desa yang belum begitu memahami secara rinci apa itu stunting, dan Dinas Kesehatan yang belum memberikan sosialisasi secara keseluruhan kepada petugas yang ada dibawahnya yang ikut serta menangani kasus stunting.

1.3. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad zulkifis (2020) dalam skripsi yang berjudul Penanggulangan angka stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dengan metode penelitian kombinasi (mixed method reseaech) hasil penelitiannya yaitu KesehatanKabupaten Enrekang dalam penanggulangan angka stunting dengan menggunakan 3 indikator diantaranya sosialisasi, pencegahan dan mengantisipasi berjalan dengan baik
2. Dian Rosa sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti (2022) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Kabupaten Bandung dalam Percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah tertuang pada Perbup No 9 tahun 2019. Hal tersebut belum bisa terlaksana sepenuhnya karena stakeholder dalam menjalankan kebijakan masih banyak yang belum memahami standard an sasaran kebijakan
3. Hafzana , Frinda , Roli Sambuardi Azmi (2021) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Cegah Stunting di Desa Sepades Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu Kabupaten Karimun masih perlu mengoptimalkan program pencegahan dan penurunan stunting dengan cara menambah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Sri Hajijah Purba (2019) dalam skripsi yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggih Kabupaten Langkat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu Implementasi kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih kurang maksimal dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengerti.
5. Aria Wiguna, Meigawati, M. Rijal Amirulloh (2022) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mampu memenuhi variable yang dijelaskan oleh Donald van metter dan Carl Varn Horn sehingga Angka stunting di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan.

1.4. Pernyataan Kebenaran Ilmiah

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan studi di Kecamatan Sulang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III, dan memberikan saran dan masukan pemerintah Kabupaten Rembang dalam Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting, apa saja yang menjadi faktor penghambat kebijakan tersebut serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen.

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data secara *triangulasi*, analisis data bersifat *induktif* dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak terkait. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan data terkait implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan dan pihak yang di wawancarai diminta untuk mengemukakan pendapat dan idenya. Selain wawancara penulis juga melakukan observasi untuk meninjau pelaksanaan kebijakan secara langsung di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

A. Transmisi

Penyampaian tentang implementasi percepatan penurunan stunting kepada pejabat yang berwenang ataupun masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang, Rapat Koordinasi Tim Teknis Audit Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rembang, Rembuk stunting Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan regulasi daerah dan launching inovasi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Rembang, sosialisasi pada saat posyandu dan melaksanakan sosialisasi dengan mendatangi rumah-rumah.

B. Kejelasan

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting ini melibatkan banyak sektor mulai dari bupati sampai pemerintah desa. Masih banyak berbagai sektor yang belum sepenuhnya mengerti dan paham akan kebijakan yang telah dibuat. Hal tersebut terjadi karena para pelaksana belum mempunyai kejelasan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan seperti halnya SOP (Standar Oprasional Prosedur).

C. Konsisten

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang merupakan salah satu tim pelaksana dalam percepatan penurunan stunting sudah memiliki inovasi yaitu TELPONI (temokno, laporno, openi), tetapi inovasi tersebut belum memiliki SOP sehingga dalam proses penurunan belum maksimal. Inovasi tersebut yang menjadi percepatan penurunan stunting menjadi kurang `konsisten dan efisien.

2. Sumber Daya

A. Staf

Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting sudah cukup. Kabupaten Rembang memiliki tim khusus dalam percepatan penurunan stunting diberbagai sektor yang mana di berbagai sektor sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menjadi koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik yang anggotanya ada 11 Organisasi Perangkat Daerah. Dan juga memiliki kader yang ada di tiap-tiap kecamatan maupun desa atau kelurahan.

B. Wewenang

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang No No 52 Tahun 2020 tentang pencegahan stunting di Kabupaten Rembang. berdasarkan wewenang resmi yang telah dibuat. Hal ini diterima baik oleh pihak dinas kesehatan dalam rangka mewujudkan kabupaten rembang zero stunting.

C. Informasi

Di Kabupaten Rembang seluruh perangkat daerah yang ikut menangani stunting sudah diberikan bekal oleh Wakil Bupati Rembang selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rembang yaitu H.M.Hanies Cholil Barro. Dalam kegiatan tersebut ketua TPPS menjelaskan tentang tugas masing-masing perangkat daerah dalam penurunan stunting di Kabupaten Rembang. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sudah paham dan menguasai tugas dan fungsinya.

D. Fasilitas

Sarana dan prasarana masih perlu di tambah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting khususnya yang ada di desa-desa. Masih ada beberapa desa yang belum memiliki kantor/ ruangan tersendiri untuk program

posyandu, dan masih banyak juga desa yang belum memiliki alat yang layak untuk mengukur tinggi dan berat badan balita.

3. Disposisi

A. Pengangkatan Birokrasi

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dapat terimplementasikan bila ada dukungan oleh birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Bisa dilihat dari hasil kerja keras petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang angka prevalensi stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang artinya para petugas sudah dianggap sangat paham dengan tujuan diadakannya program ini.

B. Insentif

Insentif merupakan suatu kesungguhan yang dilakukan seseorang untuk mengerjakan sesuatu secara optimal. Melihat kinerja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sudah memiliki insentif terhadap kebijakan percepatan penurunan stunting. Pentingnya suatu insentif agar suatu kebijakan dapat memberikan hasil dan manfaat bagi penerima kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

A. Standar Operasional Prosedur

Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman tertulis bagi staf pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya, SOP juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Telponi Stunting dalam percepatan penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Namun SOP Telponi ini masih dalam tahap penyusunan sehingga kebijakan masih berjalan kurang maksimal.

B. Fragmentasi

Pembagian tugas dalam percepatan penurunan stunting sudah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Rembang dalam kebijakan ini sudah membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dinas kesehatan dalam hal ini membantu dalam bentuk pengobatan penyakit akibat dari stunting, sehingga dengan fragmentasi kasus stunting Di Kabupaten Rembang terus mengalami penurunan.

3.2 Faktor Penghambat Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang

A. Kurangnya kerjasama dengan perangkat daerah terkait

Perangkat daerah yang ikut terlibat dalam kebijakan percepatan penurunan stunting masih beranggapan bahwa tugas dalam pencegahan dan penurunan

stunting itu hanya tugas dinas kesehatan saja. Seperti halnya Dinas PUPR dalam hal fasilitas sanitasi dan air bersih dan juga aparat dari desa setempat dalam pembangunan jamban gratis bagi warga yang kurang mampu. Hal tersebut masih terjadi di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Rembang.

B. Kurangnya layanan terkait stunting terhadap masyarakat

masyarakat masih belum puas akan layanan tentang stunting yang ada di desa sehingga masyarakat kesulitan menyampaikan keluhan. masih kurangnya pelayanan dari pemerintahan terkait pemberian informasi kepada masyarakat sehingga perlunya sarana dan prasarana dalam penanganan stunting.

C. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya gizi

Ibu hamil banyak yang tidak mengerti akan pentingnya gizi. Ibu hamil yang tidak menerapkan pola hidup sehat karena merasa tidak ada kelainan yang saya rasakan juga kurang minum vitamin. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

3.3 Upaya dalam mengatasi faktor penghambat

A. Meningkatkan Kerja Sama antara Perangkat Daerah

kerja sama yang maksimal dengan berbagai perangkat daerah terkait intervensi percepatan penanganan stunting. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik maka penanganan stunting akan lebih mudah dan cepat

B. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tentang layanan kesehatan khususnya masalah stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang melakukan berbagai upaya memberikan kantor khusus pelayanan stunting di tiap-tiap puskesmas. memberikan layanan dengan mendatangi secara langsung pendataan balita stunting pada saat posyandu di tiap-tiap desa. Dinas Kesehatan juga membentuk program kelas ibu hamil di wilayah lokasi khusus percepatan penurunan dan pencegahan stunting agar balita yang lahir nantinya tidak stunting.

C. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada kelompok sasaran.

Rendahnya pendidikan seorang ibu dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemenuhan nutrisi yang baik selama masa hamil untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya oleh karena hal tersebut perlunya pemberian informasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ibu hamil dan orang tua balita, untuk memberikan bekal pengetahuan mengenai asupan nutrisi dalam pemenuhan gizi anak dan pentingnya hidup sehat apabila masyarakat telah memahami dan menerapkan hal tersebut tentunya stunting yang terjadi pada anak akan berkurang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yaitu Dinas Pendidikan yang membuat inovasi tentang penurunan stunting yaitu TELPONI (Temokno, Laporno, Openi) dimana inovasi tersebut mempermudah dalam pelayanan masyarakat. Adanya kader yang ada di desa-desa bisa mengetahui anak-anak yang termasuk stunting dengan cara menimbang dan mengukur berat badan bayi hal tersebut termasuk dalam inovasi Temokno. Kemudian jika sudah mengetahui anak tersebut stunting kader yang ada di desa segera melaporkan(Laporno) pada kader yang ada di puskesmas dan sampai pada dinas kesehatan. Setelah itu tugas dari pemerintah memberikan perhatian yang khusus kepada anak yang mengalami stunting(Openi). Sehingga dengan cara tersebut khusus stunting di Kabupaten Rembang mengalami penurunan karena langsung ditangani oleh pemerintah. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifis, 2019) dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dalam penanggulangan angka stunting juga membuat inovasi yaitu menggunakan 3 indikator diantaranya sosialisasi, pencegahan dan mengantisipasi sehingga kasus stunting di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dalam percepatan penurunan stunting sudah berjalan dengan baik dari aspek disposisi. Sedangkan dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Dari segi disposisi sesuai dengan program yang di buat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dan sudah membuahkan hasil yang mana angka prevalensi stunting Kabupaten Rembang sudah menurun yang dimana pada tahun 2020 mencapai 24,97% hingga pada tahun 2022 11,8% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 11.14%. Jika 4 indikator berjalan dengan baik maka Kabupaten Rembang akan zero stunting. **Keterbatasan penelitian** : penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dan hanya cukup melakukan penelitian di satu desa saja. **Arah masa depan penelitian** : peneliti menyadari penelitian yang dilakukan hasilnya masih pada tahap awal, oleh karena itu peneliti berharap agar penelitian ini bisa dilanjutkan pada lokasi yang sama yaitu di Kabupaten Rembang khususnya di Kecamatan Sulang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta, hlm. 9.

Uliyanti DKK.2017. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan” Jurnal Vol. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kementerian kesehatan, ”Mengenal stunting dan gizi buruk, penyebab, gejala, dan mencegah”<https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486>, diakses pada 26 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB)

Redaksi,”Pandemi Covid-19 Kasus Stunting Meningkat, Bupati:diperlukan Kolaborasi”, berita pemerintah, <https://rembangkab.go.id/berita/pandemi-covid-19-kasus-stunting-meningkat-bupati-diperlukan-kolaborasi/amp/> diakses pada 27 agustus 2022 pukul 20.45 WIB

Viva Budy Kusnandar . “1 dari 5 Balita di Jawa Tengah Alami Stunting Pada 2021”, databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/25/1-dari-5-balita-di-jawa-tengah-alami-stunting-pada-2021> diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 19.40 WIB

Za'im Shofwan, “Kasus Stunting Rembang Mengalami Peningkatan”, Joglo Jateng, <https://joglojateng.com/2021/06/11/kasus-stunting-rembang-mengalami-peningkatan/?amp> diakses pada 27 Agustus 2022 pada pukul 20.10 WIB